

PERBANDINGAN PELAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DI KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Selma Regina Pramustika¹, Nabila Fara Dhiya², Amanda Salsa Yuliske³, Anang Sugeng Cahyono⁴, Nunun Nurhajati⁵

Universitas Tulungagung^{1,2,3,4,5}

selmareginapramustika@gmail.com, nabiladhy0404@gmail.com,

amandasalsa480@gmail.com, akusukambahdi@gmail.com, nununnurhayati@gmail.com

Received: 22-12-2024

Revised: 22-02-2025

Approved: 5-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang. Dengan fokus pada perizinan berbasis elektronik, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas OSS berdasarkan teori e-government oleh Richardus Eko Indrajit, yang mencakup dukungan, kapasitas, dan nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kabupaten telah menerapkan OSS dengan berbagai kebijakan dan dukungan infrastruktur yang berbeda. Kabupaten Tulungagung mengoptimalkan OSS melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik, integrasi data melalui Satu Data Indonesia, serta digitalisasi layanan. Sementara itu, Kabupaten Malang berfokus pada penguatan infrastruktur, penyediaan sumber daya teknologi, serta sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dan pegawai pemerintahan. Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya tantangan dalam implementasi OSS, seperti kesenjangan infrastruktur digital di daerah pedesaan serta keterbatasan edukasi bagi masyarakat terkait prosedur perizinan online. Oleh karena itu, peningkatan integrasi sistem, perluasan akses internet, dan edukasi publik menjadi faktor penting dalam optimalisasi OSS sebagai instrumen peningkatan investasi, khususnya bagi UMKM.

Kata Kunci: OSS, E-Government, Investasi, Perizinan Digital, UMKM

PENDAHULUAN

Pelayanan public menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu bentuk pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi dilakukan melalui penerapan e-government (*e-gov*). Sebagaimana disebutkan kemajuan teknologi dan penerapan *e-gov* di Indonesia bertujuan mencapai *good governance*. Dalam perkembangan *e-gov* menurut (Septiani et al. 2022). Perkembangan teknologi informasi mendorong inovasi baru dalam penyajian informasi melalui praktik *e-gov* diarahkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan mengoptimalkan kualitas pelayanan. Di Indonesia, *e-gov* digunakan oleh pemerintah untuk mendukung responif terhadap fasilitas dan aspirasi masyarakat dengan tujuan pemanfaatan dan keterbukaan pemberitahuan faktor keterlibatan publik didalam sistem pelaksanaan pemerintahan (Nur Pratiwi et al. 2023). *E-gov* di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dengan penerapan berbagai sistem berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan public *E-gov* adalah penerapan teknologi informasi oleh pemerintah untuk merubah hubungan dengan masyarakat dan dunia bisnis, memberikan layanan publik secara efisien dan fokus pada kebutuhan Masyarakat (Supriyanto 2016).

Suport merupakan faktor terpenting dalam pengembangan *e-gov*. Diperlukan adanya political will dari kepemimpinan publik agar konsep *e-gov* guna mengimplementasikan dengan baik (Ummah 2019). Tanpa dukungan ini, berbagai

inisiatif untuk membangun dan mengembangkan e-gov berpotensi tidak terwujud. Di dalam unsur kapasitas menurut Indrawan, Yuliani, and Tua (2022) mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan dan pembangunan *e-gov*. Terdapat tiga elemen utama yang harus ada yaitu Sumber daya finansial yang memadai untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-gov*, sumber daya Infrastruktur teknologi informasi yang mencukupi, merupakan kunci pencapaian penerapan e-gov, sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan ahli yang diperlukan, agar penerapan *e-gov* bisa dilakukan sesuai dengan prinsip manfaat yang diinginkan. Faktor nilai berkaitan dengan manfaat yang diperoleh oleh pemerintahan guna menyediakan layanan oleh penduduk sebagai penerima layanan *e-gov*. Dalam faktor nilai yang mengatur besar kecilnya manfaat e-gov adalah penduduk sebagai penerima layanan.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan menghadirkan layanan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang tergabung secara nasional (Nur Pratiwi et al. 2023). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar hukum pelaksanaan OSS. Sistem OSS dibuat dengan tujuan untuk mempercepat dan mengembangkan investasi usaha, serta memberikan kemudahan bagi pemilik usaha, baik yang bersifat perorangan maupun non-perorangan. Agar lebih mudah, dapat mendaftarkan atau mengelola izin untuk kegiatan usaha seperti izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang dikenal dengan OSS (Pebrianti, Rorong, and Mambo 2023). Dalam tulisan ini akan dibahas perbandingan penerapan *e-gov* di Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai sejauh mana kontribusi teknologi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

DPMPTSP di Kabupaten Tulungagung menghadapi beberapa kendala dalam penerapan OSS. Berdasarkan penelitian pendahuluan diperoleh informasi bahwa masyarakat mengeluh karena pemilik usaha belum bisa mengizinkan usaha usahanya, belum paham cara menggunakan sistem OSS. Banyak pemilik usaha membutuhkan dorongan untuk mengoperasikan sistem ini. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Mengurangi hambatan birokrasi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin beroperasi dapat membuat investasi menjadi lebih menarik. Sistem OSS juga memungkinkan pendaftaran investasi baru dan pengembangan usaha melalui secara online, sehingga mewujudkan lingkungan bisnis yang lebih ramah dan cepat. Hal ini memungkinkan pelaku ekonomi mengakses dan mendapatkan saran dengan mudah. Berbeda dengan praktik penyelenggaraan layanan OSS DPMPTSP Kab Malang menerapkan sistem pengajuan tunggal online, namun masih memerlukan perbaikan. Beberapa masyarakat belum memahami proses pengajuan izin melalui website OSS. Masalah infrastruktur seperti lambatnya jaringan internet dan kurangnya sumber daya perangkat menimbulkan kendala bagi staf yang melayani izin pengurusan masyarakat. OSS memungkinkan para pelaku usaha mengurus perizinan secara online, menghemat waktu dan biaya (Taufikurrahman et al. 2022).

Berdasarkan deskripsi diatas maka perbandingan penyelenggaraan praktik e-government melalui OSS di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang perlu dikaji lebih jauh guna memperoleh alternatif solusi agar penyelenggaraan pelayanan perijinan melalui OSS dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan OSS di salah satu Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di naungan Kementerian Investasi maupun Otoritas Penanaman Modal. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada DPMPTSP di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Luar Negeri. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berusaha memahami faktor-faktor yang memengaruhi pengoptimalan investasi melalui sistem OSS. Melalui pengumpulan data yang sistematis, diharapkan akan diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh penerapan OSS terhadap optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendataan, Online Single Submission (OSS) telah diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia antara lain di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang. OSS dirancang untuk memberikan kemudahan bagi usaha kecil maupun besar dalam memperoleh izin usaha. Namun terdapat perbedaan kebijakan disetiap daerah, dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan tingkat digital masyarakat. Teori yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian adalah teori pelaksanaan *e-gov* yang diusulkan oleh Richardus Eko Indrajit. Terdapat tiga indikator dalam pelaksanaan e-government, yaitu : dukungan, kapasitas, dan nilai (Aprianty 2016).

Support

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan dukungan yang signifikan terhadap program Online Single Submission (OSS) sebagai upaya untuk memajukan iklim investasi dan pelayanan publik. Beberapa langkah strategis yang telah diambil meliputi:

- 1) Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP): Pemerintah Tulungagung berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui MPP, yang direncanakan untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus berbagai macam perizinan, termasuk melalui OSS.
- 2) Satu Data Indonesia (SDI): Dalam rangka mendukung perencanaan yang berbasis data, Kabupaten Tulungagung telah mengintegrasikan data pembangunan melalui portal SDI. Hal ini memastikan bahwa data yang tersedia akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sekaligus menunjang OSS sebagai sistem yang terpadu.
- 3) Digitalisasi dan Inovasi: Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai aplikasi digital untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan. Salah satunya adalah aplikasi cinta (Kolaborasi Informasi dan Data Tulungagung) yang berfungsi mendukung proses perizinan berbasis OSS.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan investasi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan efisiensi administrasi melalui penggunaan teknologi elektronik. Untuk informasi mengunjungi <https://tulungagung.go.id/>. Untuk mempermudah proses perizinan usaha melalui OSS

di Kabupaten Tulungagung, telah disediakan kemudahan yang signifikan bagi para pelaku usaha, terutama dalam memperoleh NIB dengan cepat dan terbuka. DPMPSTSP berkomitmen untuk mendukung kelancaran tersebut. Berkomitmen untuk melakukan sosialisasi OSS hingga ke tingkat desa melalui program MOSS Keliling dan Bimbingan Teknis (BIMTEK). Inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman masyarakat desa, sehingga mereka dapat lebih mudah memanfaatkan OSS dalam pengurusan izin usaha. Selain itu, sistem OSS RBA turut mendorong pertumbuhan UMKM di Tulungagung dengan memberikan kemudahan beradaptasi. Dengan perizinan yang lebih sederhana, pemerintah juga mendorong inovasi produk dan kolaborasi antar-pelaku usaha, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan usaha.

Sementara Kabupaten Malang telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mendukung penerapan sistem OSS melalui penguatan infrastruktur. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penyediaan sumber daya seperti komputer, printer, dan jaringan internet yang memenuhi. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan sosialisasi terkait perizinan yang berbasis OSS. Berikut adalah rincian dari dukungan infrastruktur tersebut :

- 1) Penyediaan Sumber Daya Teknologi
 - Komputer dan Printer: Tersedia untuk mendukung proses administrasi dan pengolahan data perizinan.
 - Jaringan Internet: Infrastruktur internet yang kuat dan stabil memastikan akses yang optimal terhadap sistem OSS.
- 2) Sosialisasi dan Pelatihan
 - Kegiatan Sosialisasi: Dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai perizinan yang berbasis OSS.
 - Pelatihan untuk Pegawai: Diberikan kepada pegawai pemerintah daerah agar mereka dapat mengoperasikan sistem OSS dengan efektif.
- 3) Integrasi Sistem Pelayanan
 - Sistem Perizinan Terintegrasi: Penerapan OSS memungkinkan proses perizinan berjalan lebih terintegrasi dan efisien.
 - Pengawasan Perusahaan: Dengan adanya OSS, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman modal.
- 4) Rencana Induk Infrastruktur
 - Master Plan Infrastruktur SPBE: Sebuah rencana induk yang mencakup perkembangan infrastruktur untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capacity

Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan untuk menerapkan dan mewujudkan *e-gov*, yaitu:

- 1) Sumber daya manusia, seperti pegawai yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat dan menjalankan tugas dengan baik
- 2) Sumber daya finansial, seperti ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan *e-gov*
- 3) Sumber daya infrastruktur, seperti sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem

informasi.

DPMPTSP Kabupaten Tulungagung berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini didukung oleh bukti bahwa DPMPTSP merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan perizinan dan investasi kepada masyarakat. Mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbuka melalui OSS. Tugas dan fungsi utama DPMPTSP berdasarkan (Dinkesta, n.d.) meliputi penerbitan izin usaha, pengelolaan perizinan, dan fasilitasi investasi. Dengan demikian, DPMPTSP membantu pelaku usaha mengakses layanan perizinan secara online melalui OSS, menjadikan proses tersebut lebih mudah, cepat, dan terbuka. Kabupaten Tulungagung juga memiliki beragam sumber daya infrastruktur yang mendukung implementasi OSS, antara lain:

- **Konektivitas Internet:** Akses internet di Kabupaten Tulungagung semakin meluas, khususnya di area perkotaan dan pusat bisnis. Hal ini memudahkan pelaku usaha untuk mengakses platform OSS secara online dengan lancar.
- **Jaringan Telekomunikasi:** Jaringan telekomunikasi di Tulungagung sudah cukup baik, dengan adanya layanan dari beberapa operator seluler dan internet yang menjangkau sebagian besar wilayah. Hal ini sangat penting untuk mendukung komunikasi dan interaksi dalam proses OSS.

Namun ketersediaan infrastruktur di Tulungagung belum merata. Beberapa daerah, terutama di kawasan pedesaan, masih mengalami kendala dalam akses internet. Oleh karena itu, diperlukan Tindakan untuk meningkatkan jangkauan internet dan infrastruktur pendukung di seluruh wilayah. Kabupaten Tulungagung, agar OSS dapat diakses dengan mudah dan lancar oleh semua pelaku usaha. Menurut (adam kukuh kurniawan, 2023) DPMPTSP Kabupaten Malang mendukung system OSS, telah menunjukkan loyalitas yang baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam komunikasi dengan masyarakat. Beberapa sumber menunjukkan bahwa ada proses yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan OSS, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan. Selain itu, informasi dan edukasi mengenai OSS masih terbatas, sehingga banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami alur dan prosedur pengurusan perizinan secara online. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, DPMPTSP Kabupaten Malang perlu terus berupaya dalam memperkuat integrasi sistem, meningkatkan akses informasi, serta memperluas program edukasi bagi Masyarakat (Muttaqin Adhar, n.d.). Sumber daya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan OSS, meskipun informasi khusus mengenai infrastruktur yang diperuntukkan khusus bagi OSS masih terbatas. Berikut adalah beberapa elemen infrastruktur yang dapat membantu kelancaran sistem OSS di Kabupaten Malang :

- **Jaringan Internet:** Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Malang cukup baik, dengan jaringan internet yang mencakup area perkotaan maupun pedesaan. Akses internet yang handal sangat penting untuk mendukung sistem OSS yang berbasis online.
- **Sumber Daya Manusia:** Kabupaten Malang memiliki pegawai yang terampil dan berpengalaman di bidang teknologi informasi. Ketersediaan ahli IT menjadi aset berharga dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem OSS.
- **Fasilitas Publik:** Di Kabupaten Malang, tersedia berbagai fasilitas publik

seperti kantor pemerintahan, pusat layanan masyarakat, dan ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai titik akses internet dan informasi terkait OSS.

Value

Menurut eko Indrajit value yaitu Indikator value atau nilai dalam teori Indrajit terkait dengan manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan suatu kebijakan. DiTulungagung, penerapan OSS difokuskan pada kemudahan akses perizinan bagi UMKM, Terutama dalam sektor kerajinan, industri rumah tangga, dan pertanian. Dengan memanfaatkan potensi produk kerajinan dari batu dan tembaga, OSS bertujuan untuk membantu UMKM lokal dalam mendapatkan izin dan legalitas usaha dengan lebih mudah. Langkah ini memberikan dampak positif yang langsung terasa oleh pengusaha kecil, memungkinkan mereka untuk memperluas skala usaha atau meningkatkan legalitas demi kemudahan akses ke pasar yang lebih luas serta sumber daya yang lebih beragam (Yuhandra et al. 2021). OSS di Kabupaten Tulungagung memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku usaha, terutama UMKM, dengan mempermudah dan mempercepat proses perizinan melalui pengurangan birokrasi. Sistem ini memungkinkan penerbitan izin untuk usaha berisiko rendah melalui mekanisme self-declaration, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien. Selain mempermudah perizinan, OSS juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai investasi dan legalitas usaha, yang sangat penting untuk keamanan pangan serta kelangsungan bisnis mereka. OSS berperan penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di tingkat lokal, serta mendukung sektor-sektor potensial seperti kerajinan dan produksi rumah tangga. Menurut (Adi, Oka, and Wati 2021) Sektor kerajinan dan pertanian menjadi fokus utama, di mana OSS mempermudah proses perizinan untuk memproduksi barang-barang seperti batu permata, keramik, batu marmer dan tembaga . Selain itu, OSS di Tulungagung juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM, yang suatu saat akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di tingkat lokal, terutama dalam sektor kerajinan dan produksi rumah tangga. Dengan fokus utama pada kemudahan akses perizinan, OSS sangat mendukung sektor kerajinan dan pertanian, yang membutuhkan izin untuk memproduksi barang-barang seperti batu permata, keramik, dan tembaga.

Penerapan OSS di Kabupaten Malang lebih fokus pada mempermudah proses perizinan bagi usaha besar dan menengah, terutama di sektor pariwisata, industri, dan agribisnis. Berdasarkan hasil riset Kabupaten Malang, yang memiliki kawasan wisata terkenal seperti Batu dan Pantai Selatan, sangat bergantung pada sektor pariwisata yang memerlukan izin yang cepat dan mudah. OSS memudahkan pelaku usaha di sektor ini, seperti hotel, restoran, atau tempat wisata, untuk mengurus izin yang rumit, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga dapat mempercepat pengembangan usaha mereka. Dengan sistem perizinan yang lebih efisien, sektor pariwisata dan industri di Malang diperkirakan akan berkembang pesat dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama di bidang hospitality dan jasa. Hal ini juga memberi manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal. OSS mendukung sektor- sektor yang membutuhkan investasi besar, seperti pariwisata, industri manufaktur, dan pertanian modern, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik Malang sebagai tujuan investasi.

Tabel 1.
Perbandingan

Model	OSS Tulungagung	OSS Malang
e-gov		
1. Support	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) bertujuan untuk mempermudah proses perizinan. 2. Integrasi data melalui Satu Data Indonesia (SDI) mendukung perencanaan yang berbasis data. 3. Aplikasi digital seperti Cinta telah dikembangkan untuk memperlancar akses kepada informasi.DPMPTSP 4. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan MOSS keliling dan BIMTEK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan komputer, printer, dan jaringan internet yang memadai untuk mendukung proses perizinan. 2. Pemerintah setempat mengadakan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan pegawai mengenai OSS. 3. Rencana induk pengembangan infrastruktur juga disusun untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),
2. capacity	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP Kab Tulungagung berusahamenjalankan tugasnya dengan baik. DPMPTSP merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan perizinan dan investasi kepada masyarakat. 2. Akses internet di Kabupaten Tulungagung semakin meluas, khususnya di area perkotaan dan pusat bisnis. 3. Jaringan telekomunikasi di Tulungagung sudah cukup baik, dengan adanya layanan dari beberapa operator seluler dan internet yang menjangkau sebagian besar wilayah. 4. ketersediaan infrastruktur di Tulungagung belum merata. Beberapa daerah, terutama di kawasan pedesaan, masih mengalami kendala dalam akses internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP Kabupaten Malang mendukung sistem OSS dan menunjukkan komitmen yang lebih baik. Namun, ada tantangan dalam komunikasi dengan masyarakat, dan proses yang belum terintegrasi sepenuhnya. Informasi dan edukasi tentang OSS masih terbatas, sehingga banyak <ol style="list-style-type: none"> 2. yang belum paham. 3. Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Malang cukup baik, dengan jaringan internet yang mencakup area perkotaan maupun pedesaan. 4. Di Kabupaten Malang, tersedia berbagai fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, pusat layanan masyarakat, dan ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai titik akses internet dan informasi terkait OSS.
3. value	<p>Mempermudah akses izin dan legalitas bagi UMKM lokal, memberikan dampak positif bagi pengusaha kecil dengan memperluas usaha dan meningkatkan legalitas. inisiatif ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor kerajinan dan produksi rumahan</p>	<p>Sistem OSS mempermudah proses perizinan bagi usaha besar dan menengah di Kabupaten Malang, terutama di sektor pariwisata yang penting bagi daerah ini. Para pelaku bisnis seperti hotel, restoran, dan objek wisata dapat lebih cepat mengurus izin seperti IMB.</p>

SIMPULAN

Pada aspek support, penyelenggaraan OSS DI Kabupaten Tulungagung dan Malang sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik berbasis teknologi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Tulungagung memfokuskan upayanya pada pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), aplikasi digital seperti Cinta, dan sosialisasi melalui kegiatan MOSS Keliling serta BIMTEK. Di sisi lain, Malang lebih menekankan pada penyediaan infrastruktur fisik, termasuk komputer dan jaringan internet, serta pelatihan terkait sistem OSS dan pengembangan infrastruktur SPBE. Pada aspek capacity, penyelenggaraan OSS di Kabupaten Tulungagung memiliki akses internet yang cukup baik di wilayah perkotaan, tetapi masih menghadapi tantangan di daerah pedesaan. Sementara itu, penyelenggaraan OSS di Kabupaten Malang lebih unggul pada jaringan internet dan merata hingga ke pedesaan, serta fasilitas publik yang mendukung akses informasi OSS. Dalam aspek value, penyelenggaraan OSS di Tulungagung memprioritaskan kemudahan perizinan bagi (UMKM) lokal untuk mendukung usaha kecil dan menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor kerajinan. Sedangkan penyelenggaraan OSS di Kabupaten Malang lebih fokus pada penyederhanaan proses perizinan bagi usaha besar dan menengah, terutama di sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran. Dengan demikian, Tulungagung berusaha memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM, sedangkan Malang mendorong investasi di sektor unggulan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ni Nyoman Serma, Dewa Nyoman Oka, and Ni Made Serma Wati. 2021. "Dampak Positif Dan Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 5(1):43. doi: 10.23887/jipp.v5i1.32803.
- Aprianty, Diah Rachma. 2016. "Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." *Pelayanan Publik Dalam E-Government* volume 4(4):hlm. 1593.
- Indrawan, Indrawan, Febri Yuliani, and Harapan Tua. 2022. "Implementasi Elektronik Government (E-Gov) Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kecamatan Dumai Kota." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4(6):4771-77.
- Nur Pratiwi, Oky, Zulfan Nahrudin, Asri Nur Aina, and Indar Arifin. 2023. "Responsivitas Pemerintah Melalui Elektronik Government (E-Gov) Di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Negara* 29(1):61-81. doi: 10.33509/jan.v29i1.2255.
- Pebrianti, Erni, Arie J. Rorong, and Rully Mambo. 2023. "Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bitung." *Jurnal Administrasi Publik* IX(2):17-28.
- Septiani, Adilla, Syamsir Syamsir, Afifah Rahma Aulia, Auliya Resti, Viona Fazira, Dwi Andini Sukma Wijaya, and Zakia Aldeo. 2022. "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3(5):302. doi: 10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183.
- Supriyanto, Eko Eddy. 2016. "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1(1):141. doi: 10.24905/jip.v1i1.438.
- Taufikurrahman, Yusuf Suhadi, Hilda Dyah Safitri, Irgi Fajrul Falah, Bunga Myrtha Prajna, and Untari Hesti Ningsih. 2022. "Al-Khidmah Pendampingan Dan

- Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Desa.” *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):60–73.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. “Analisis Penerapan Website Dalam Rangka E-Government Di Kabupaten Tegal.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.
- Yuhandra, Erga, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, And Teten Tendiyanto. 2021. “Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04:78–84.